

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik (edisi revisi)*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J.,W. 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto, Agus. 2005. *Mengapa Pelayanan Publik?* dalam Dwiyanto, Agus (Ed), *Mewujudkan Good Governance dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Goldsmith, Stephen dan Eggers, William D. 2004 . *Governing by Network : The New Shape of the Public Sector*. Washington DC. Brooking Institution Press.
- Hafild, Emmy (Ed). 2008. *Laporan Studi : Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik*. Jakarta. Transparency International Indonesia dan Transparency International.
- Kanto, Sanggar dalam Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi : Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta. Kencana.
- Krippendorff, Klaus. 1991. *Analisis Isi : Pengantar Teori dan Metodologi (Content Analysis : introduction to It's Theory and Methodology)*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gava Media.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Andi Offset.
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta. Gramedia.
- Nigro, Felix A. dan Nigro, Lyoyd G. 1989. *Modern Public Administration*. New York. Harper & Row.
- Nugroho, Riant. 2013. *Public Policy : Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. 2014. *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Pito, Toni Andrianus dkk. 2006. *Mengenal Teori-teori Politik : dari Sistem Politik Sampai Korupsi*. Bandung. Nuansa.
- Pratikno. 2007. *Pemerintah : Dari Orientasi Hierarki ke Jaringan*, dalam Pratikno (Ed), *Mengelola Dinamika Politik dan Jejaring Kepemerintahan Daerah : Kemitraan, Partisipasi dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM.
- Reksohadiprojo, Sukanto. 2013. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta. BPFE Yogyakarta.

- Schreier, Margrit. 2012. *Qualitative Content Analysis in Practice*. Croydon, England. SAGE Publication.
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta. PT Grasindo.
- Sutiono, Agus dan Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Dalam Birokrasi Publik di Indonesia*, dalam *Memahami Good Governance dalam Perspektif SDM*. Gava Media.
- Thoha, Miftah. 2014. *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta. Kencana.
- Utomo, Warsito. 2012. *Administrasi Publik Baru Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Wibawa, Samodra. 2008. *Good Governance dalam Otonomi Daerah*, dalam *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Agus Dwiyanto (ed). Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance*. Surabaya. Insan Cendekia.

Jurnal dan Laporan Ilmiah :

- Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance : Modul 1 dari 5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. Jakarta. LAN.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN). 2007. *Penerapan Good Governance di Indonesia*. Jakarta. LAN.

Sumber online :

- _____. Fakta Mengenai Jerman. Diakses dari <http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/id/sistem-politik/main-content-04/bundestag-parlemen-federal-jerman.html>, tanggal 16 September 2015.
- _____. Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu DPR Tahun 2009. Diakses dari <http://www.rumahpemilu.org/in/read/747/Hasil-Perolehan-Suara-Peserta-Pemilu-DPR-Tahun-2009>, tanggal 26 Juli 2016.
- _____. *Party and Campaign Funding : Is Malaysia Already a Plutocracy?*. Diakses dari <http://partyforumseasia.org/2014/11/28/party-and-campaign-funding-is-malaysia-already-a-plutocracy/>, tanggal 29 September 2015.
- _____. http://dppka.jogjapro.go.id/upload/files/pergub_42-2008_tupoksi_dppka.pdf, diakses tanggal 2 April 2016.
- _____. <http://partaigerindra.or.id/LaporanKeuanganGerindra2010-2012/HasilAuditBPK2010.pdf>, diakses tanggal 8 April 2016.

- _____<http://partaigerindra.or.id/LaporanKeuanganGerindra2010-2012/> HASIL
AUDIT LAPORAN APBNTAHUN 2013.pdf, diakses tanggal 8 April 2016.
- _____<http://partai.kpu.go.id/browse.php>, diakses tanggal 26 Juli 2016.
- _____<http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/5/Tugas-dan-Kewenangan>, diakses tanggal 2 April 2016.
- _____<http://www.setdaprovkaltim.info/profil-biro-biro/biro-hukum/>, diakses 2 April 2016.
- Act on Political Parties (Political Parties Act / Parteingesetz-partG)* of 24 July 1967, published version on 31 January 1994, last amended by the Ninth Act amending the Political Parties Act, of 22 December 2004 (Federal law Gazette I 2004, p. 3673), diakses dari <https://www.bundestag.de/blob/189734/2f4532b00e4071444a62f360416cac77/politicalparties-data.pdf>, tanggal 16 September 2015.
- Adi, Amarta Alit. 2013. *Naskah Publikasi Tesis Politik Hukum Pengaturan Keuangan Partai Politik di Indonesia*. Diakses dari <http://baramerahputih.blogspot.co.id/2013/07/naskah-publikasi-tesis-politik-hukum.html>, tanggal 19 September 2015.
- Austin, Reginal dan Tjernström, Maja (Eds). 2003. *Funding of Political Parties and Election Campaigns*. Sweden. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). Diakses dari <http://www.idea.int/publications/funding-of-political-parties-and-election-campaigns/loader.cfm?csModule=security/getfile&pageID=64347>, tanggal 29 September 2015.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. 2014. *Penelitian Hukum tentang Akuntabilitas Pendanaan Partai Politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011*. Diakses dari http://www.bphn.go.id/data/documents/lap.akhir_penelitian_hukum_akuntabilitas_pendanaan_parpol.pdf tanggal 21 Agustus 2015.
- Carlson, Matthew. 2010. *Financing Democracy in Japan : The Allocation and Consequences of Government Subsidies to Political Parties*. Diakses dari sagepub.co.uk, tanggal 16 September 2015.
- Carlsson, Lars dan Sandström, Annica. 2008. *Network Governance in Common*. International Journal of the Commons Vol 2, no 1 January 2008, pp. 33-54. Publisher: Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services for IASC. Diakses dari https://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/bitstream/handle/10535/3378/Network_Governance_of_the_Commons.pdf?sequence=1, tanggal 20 September 2015.
- Collins, Kathleen. 2012. *After the Kyrgyz Spring : Challenges to Democratic Deepening*. The Brown Journal of World Affairs, 10/2012, Volume 19, Issue 1. Diakses dari <https://www.brown.edu>, tanggal 20 April 2017.

- Keban, Philipus. 2012. *Menyoal Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Diakses dari http://philipus-k-s-fisip.web.unair.ac.id/artikel_detail-68324-Umum-Menyoal_persen_20Akuntabilitas_persen20_Birokrasipersen20Publik.html, tanggal 2 April 2016.
- Komisi Informasi. 2015. *Transparansi Pendanaan Parpol*. Diakses dari <http://www.komisiinformasi.go.id/news/view/transparansi-pendanaan-parpol>, tanggal 26 Februari 2015.
- Lembaga Administrasi Negara. 2011. *Pedoman Pemantauan dan Evaluasi*. Diakses dari <http://www.lan.go.id/images/RB/MEP.pdf>, tanggal 8 April 2016.
- Noris, Pippa dan van Es, Andrea Abel. 2006. *Checkbook Elections : Political Finance in Comparative Perspective (Executive Report)*. Diakses dari http://carnegieendowment.org/files/Checkbook_Elections_brief.pdf, tanggal 29 September 2015.
- Pranowo, Ganjar. *Menata Kembali Partai Politik*. Diakses dari www.slideshare.net, tanggal 8 April 2016.
- Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2015. *Executive Summary : Dukungan APBN Untuk Pendanaan Partai Politik di Indonesia*. Diakses dari <http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/dw-konten-view.asp?Id=20151230092607435820332>, tanggal 12 Februari 2016.
- Sandino, Girindra. 2014. *Transparansi dan Akuntabilitas Partai Politik*. Diakses dari <http://www.rumahpemilu.org/in/read/5203/Transparansi-dan-Akuntabilitas-Partai-Politik-oleh-Girindra-Sandino->, tanggal 28 Februari 2016.
- Satria. 2010. *Mendesak, Reformasi Pembiayaan Partai Politik*. Diakses dari https://ugm.ac.id/id/berita/2476-mendesak_reformasi_pembiayaan_partai_politik, tanggal 17 September 2015.
- Siantoro, Ayu. 2015. *Menimbang Dana untuk Partai Politik*. Diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2015/03/16/15000001/Menimbang.Dana.untuk.Partai.Politik>, tanggal 10 April 2015.
- Supriyanto, Didik (Ed). 2011. *Anomali Keuangan Partai Politik : Pengaturan dan Praktek*. Diakses dari keuanganlsm.com/.../Anomali-Kuangan-Partai-Politik-Pengaturan-dan-Praktek.pdf, tanggal 15 Maret 2016.
- Supriyanto, Didik dan Wulandari, Lia. 2012. *Bantuan Keuangan Partai Politik : Metode Penetapan Besaran, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan*. Diakses dari <http://www.rumahpemilu.org/in/read/539/Bantuan-Kuangan-Partai-Politik-Metode-Penetapan-Besaran-Transparansi-dan-Akuntabilitas-Pengelolaan>, tanggal 22 September 2015.
- Surbakti, Ramlan. 2015. *Roadmap Pengendalian Bantuan Keuangan Partai Politik Peserta Pemilu*. Jakarta. Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata

Pemerintahan di Indonesia. Diakses dari <http://kemitraan.or.id/sites/default/files/ROADMAPpersen20PENGENDALIANpersen20KEUANGANpersen20PARTAIpersen20POLITIKpersen20PESERTApersen20PEMILUpersen20FA.pdf>, tanggal 8 April 2016.

Syafarani, Rainny. 2012. *Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Parpol*. Diakses dari <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/kolom-pemilukada/720-akuntabilitas-dan-transparansi-keuangan-parpol>, tanggal 28 Februari 2016.

United Nation Development Programme. 2002. *Human Development Report 2002 : Deepening Democracy in A Fragmented World*. Diakses dari http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/263/hdr_2002_en_complete.pdf, tanggal 20 September 2015.

vanHeerde-Hudson, Jennifer dan Fisher, Justin. 2011. *Parties Heed (With Caution): Public Knowledge Of And Attitudes Towards Party Finance In Britain*. Sage Journals, Vol. 19, No. 1, pp. 41-60. Diakses dari ppq.sagepub.com/content/19/1/41, tanggal 25 Februari 2015.

Wong, Joseph. 2003. *Deepening Democracy in Taiwan*. Pacific Affairs; Summer 2003; 76, 2; Research Library. Diakses dari <https://www.brown.edu>, tanggal 20 April 2017.

Wulandari, Lia. 2015. *Siaran Pers Bantuan Keuangan Partai Politik : Meningkatkan Bantuan keuangan Partai Politik*. Diakses dari http://www.perludem.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=1944:siaran-pers-bantuan-keuangan-partai-politik-12-maret-2015&Itemid=128, tanggal 14 September 2015.

Peraturan Perundangan :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerja Sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerja Sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik.

Keputusan BPK RI No. 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 213-0386 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di DPR-RI Hasil Pemilu Tahun 2014 untuk Tahun Anggaran 2015.

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98/KEP/2015 tentang Penetapan Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Hasil Pemilu Tahun 2014.

Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 718 tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2017.

Lain-lain :

Badan Kesbangpol DIY. 2010. *Materi PP No. 5/2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik*.

Data Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Hasil Pemilu Tahun 2014, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan

Partai Politik yang Bersumber dari Dana APBN Tahun 2014 Pada
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dan Dewan Pimpinan
Pusat (DPP) Partai Politik di Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Pemerintah D.I.
Yogyakarta Tahun Anggaran 2014.

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi D.I.
Yogyakarta atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Bantuan Keuangan Partai Politik Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun
Anggaran 2015.

Wahyuni, Hermin Indah. 2015. *Materi Kuliah Metode Penelitian Administrasi
Publik : Analisis Isi Kebijakan Publik.*